

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi di Indonesia mulai diimplementasikan pada era reformasi sekitar tahun 1998. Desentralisasi merupakan konsep utama dalam pemerintahan modern yang menitikberatkan pada pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan desentralisasi pemerintah daerah bisa secara bebas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerahnya sesuai dengan masyarakatnya. Meskipun desentralisasi telah diterapkan di Indonesia, pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar. Sejak dimulainya kebijakan ini, berbagai hambatan muncul sehingga mengurangi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan kapasitas antar daerah, di mana sebagian daerah mampu menjalankan otonomi secara efektif, sementara lainnya masih sangat bergantung dengan pusat. Selain itu, praktik korupsi, ketidaktepatan dalam pengalokasian anggaran karena minimnya ahli terkait turut menjadi persoalan serius yang mengambat keberhasilan desentralisasi.²

Pada tingkat daerah, aspek penting yang harus diatur secara hati-hati dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi yang baik adalah masalah

² Hilma Lathifah, dkk., "Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi:, *Jurnal Komunikasi & Admninistrasi Publik*, Vol. 11 No. 2, (2024), Hal. 578

pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijakan keuangan tahunan dari pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah milik rakyat dan bukan milik pemerintah. Pemerintah daerah disini hanya memiliki wewenang untuk mengelola APBD secara maksimal, kemudian menyalurkannya secara transparan dan tepat sasaran khususnya yang berada di wilayah pedesaan agar anggaran tersebut bermanfaat bagi seluruh rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga rakyat bisa terjamin kesejahteraannya.⁴

Terselenggaranya kesejahteraan di wilayah pedesaan merupakan tujuan utama pembangunan desa yang dilaksanakan melalui partisipasi aktif masyarakat serta pengelolaan sumber daya secara transparan dan akuntabel sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, juga mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan kemampuan masyarakat itu sendiri.⁵ Dengan mempertimbangkan bahwa desa secara historis memiliki kemampuan untuk

³ Muhammad Idris Patarai, *Kinerja Keuangan Daerah*, (Makassar: De La Macca, 2017), hal. 206

⁴ Hendra Karianga, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*, (Depok: KENCANA, 2017), hal. 3

⁵ Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), hal. 1

melakukan pengelolaan desa secara mandiri, menandakan bahwa pemerintah desa memegang wewenang penuh otonom daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan terhadap keuangan. Pengelolaan keuangan setiap desa bisa memengaruhi pertumbuhannya. Selain sumber daya manusia yang dapat dipercaya, pengelolaan keuangan desa juga membutuhkan sumber daya keuangan yang memadai.⁶

Pengelolaan keuangan pemerintah desa diwujudkan melalui penyusuan anggaran pendapatan dan belanja yang transparan, partisipatif, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan serta pelayanan masyarakat di desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau biasa disebut APBDes adalah bentuk tanggung jawab dari pemerintah desa sebagai manajemen desa kepada masyarakat dan pemerintah. APBDes berisi informasi tentang semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di desa, termasuk segala pelaksanaan rencana program yang dibiayai dengan dana desa. Proses penganggaran akan dialokasikan pada kegiatan desa sehingga hasil perumusan strategi atau perencanaan yang dibuat akan sesuai. Dalam hal ini, APBDes berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan alokasi sumber daya untuk kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga ini tidak hanya meningkatkan relevansi program yang dijalankan, melainkan mengajak partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan. Dengan demikian, APBDes tidak hanya menjadi alat untuk mengatur keuangan,

⁶ Verawati, dkk., “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangajene dan Kepulauan”, *Jurnal Ekonomi Prioritas*, Vol. 3 No. 3, (2023), hal. 106

tetapi juga untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah setempat, karena yang terpenting adalah untuk keberlanjutan desa itu sendiri.⁷

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes menggunakan komponen pendapatan dan belanja untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, APBDes juga merupakan sumber ukuran standar yang digunakan untuk evaluasi kinerja keuangan.⁸ Proses evaluasi yang dilakukan pemerintah desa guna mengidentifikasi seberapa baik perangkat desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama masa kerja. Selain itu bisa digunakan untuk menilai seberapa jauh pemerintah desa sudah mencapai pembangunan desa dan pelayanan publik serta untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, dan area yang perlu perbaikan. Dengan adanya APBDes, pemerintah desa bisa memiliki rencana pengelolaan keuangan desa secara terstruktur sehingga kedepannya mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

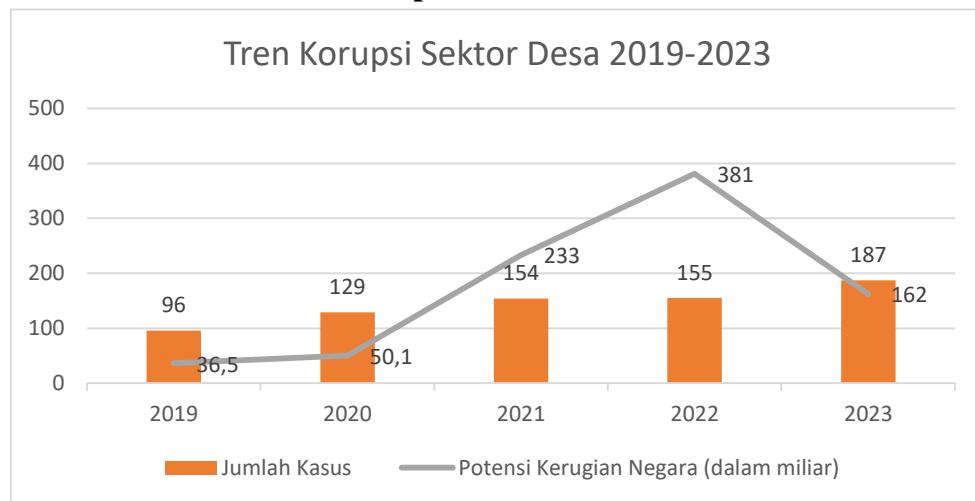
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kerap menjadi sorotan publik seiring maraknya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah perangkat desa dalam menyalahgunakan wewenang dalam mengelola dana desa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa sebagai pengelola keuangan publik lama kelamaan akan memudar

⁷ Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁸ Fatchur Rohman, dkk., "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pemerintah Desa Jambu)", *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 6 No. 1, (2020), hal. 63

bahkan berasumsi itu adalah hal yang wajar. Kasus korupsi oleh perangkat desa semakin marak diperbincangkan dan menjadi perhatian serius di berbagai daerah. Mengingat jumlah suntikan dari pemerintah pusat ke desa cukup besar, hal ini berakibat rawan terjadi penyelewengan anggaran. Dana desa yang seharusnya digunakan sebagai pembangunan infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat, justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus terkait korupsi di pemerintah desa selalu berada di posisi teratas pada laporan tren korupsi ICW pada kurun waktu lima tahun ke belakang.⁹ Tidak sampai disitu, jumlah kerugian yang timbul kini mencapai ratusan miliar. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:¹⁰

Tabel 1.1
Grafik Tren Korupsi Sektor Desa 2019-2023



Sumber : Grafik Tren Korupsi ICW diolah, 2025

⁹ Sahabat ICW, dalam <https://sahabaticw.org/donasi/bangun-bersama-desa-berintegritas>, diakses 20 Januari 2025

¹⁰ Diki Ananya dan Kurnia Ramdhana, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi 2023*, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2024), hal. 10

Grafik data diatas menunjukkan adanya lonjakan jumlah potensi kerugian negara di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun jika dilihat mundur sejak tahun 2019, potensi kerugian negara mengalami peningkatan secara konsisten. Berdasarkan kacamata akuntansi, tingginya tingkat korupsi yang terjadi menunjukkan terjadi kebocoran dari anggaran yang mana bisa mengganggu kinerja keuangan daerah kedepannya. Dengan kata lain, terjadinya korupsi bisa berakibat tidak terlaksananya rencana kerja dengan baik.¹¹ Dengan demikian, perlunya optimalisasi lebih dalam mengenai mekanisme pengawasan dan pendampingan untuk kepala desa serta perangkatnya terhadap bagaimana kinerja dalam mengelola dana desa.

Cara desa mengelola keuangan sangat berpengaruh terhadap masa depan karena menentukan apakah desa dapat berkembang. Pengelolaan keuangan desa akan menunjukkan seberapa baik pemerintahannya. Pengelolaan yang bijak memungkinkan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Sebaliknya, pengelolaan yang buruk dapat menghambat potensi desa itu sendiri. Oleh karena itu penting dilakukannya penilaian terhadap kinerja keuangan desa untuk mengetahui seberapa efektif dan efisiennya dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. Keuangan desa harus dikelola dengan lebih efektif yang berarti bahwa anggaran digunakan dengan cara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan efisien berarti

¹¹ Alex Zami, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, Vol. 3 No. 2, (2020), hal. 122

anggaran digunakan dengan cara yang memaksimalkan output, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat yang optimal.

Baik atau tidaknya suatu desa dalam mengelola keuangannya dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah pada desa melalui identifikasi rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan desa terhadap APBDes yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan sebelumnya. Dengan adanya analisis rasio keuangan terhadap APBDes, memberi semua pihak yang berkepentingan mempunyai alat untuk memeriksa berbagai aspek keuangan APBDes tersebut. Rasio keuangan sebagai alat analisis dari laporan realisasi anggaran dan belanja desa. Rasio keuangan adalah kegiatan yang membandingkan angka-angka di dalam laporan keuangan dengan angka lainnya.¹²

Penelitian ini difokuskan pada laporan keuangan pemerintah desa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2019 sampai 2023. Objek yang digunakan dalam penelitian ini di Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Pada setiap tahunnya, desa ini menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa untuk melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana sumber daya digunakan di Desa Kepuhrejo serta untuk evaluasi dan penilaian kinerja yang telah dicapai. Adapun data realisasi pendapatan dan anggaran belanja Desa Kepuhrejo dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹² Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Depok: Rajwali Pers, 2018), hal. 104

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Desa Kepuhrejo
Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2019	2.095.830.344	2.097.861.368,81	2.042.330.344	2.043.721.608,96
2020	1.738.356.836	1.740.309.556,39	1.738.356.836	1.738.356.836
2021	1.866.841.644	1.869.214.320,55	1.843.309.224	1.841.841.643,92
2022	2.006.388.902	2.007.826.773,28	1.909.388.902	1.909.388.902
2023	1.935.050.826	1.935.427.923,14	1.910.050.826	1.910.050.826

Sumber : Pemerintah Desa Kepuhrejo diolah, 2024

Tabel diatas menampilkan besarnya nominal realisasi anggaran pada pendapatan dan belanja Desa Kepuhrejo selama lima tahun terakhir yang mengalami fluktuasi atau kondisi naik turun. Pada beberapa tahun tertentu menunjukkan keadaan dimana realisasi yang terjadi tidak sesuai dengan anggaran awal sehingga mengakibatkan terjadinya kondisi kurang dan lebih anggaran baik pada pendapatan ataupun belanja. Belum diketahui secara pasti mengapa kondisi itu bisa terjadi karena memang sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian terkait kinerja keuangan di Desa Kepuhrejo. Dengan adanya ketidaksesuaian antara realisasi dan anggaran ini membuat peneliti tertarik ingin meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana kinerja keuangan Desa kepuhrejo jika dilihat menggunakan perhitungan tiga rasio, yakni rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan dalam lima tahun terakhir.

Peneliti menggunakan ketiga rasio tersebut karena analisis kinerja keuangan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan tergolong langkah awal dalam mengevaluasi sejauh mana pengelolaan keuangan di Desa Kepuhrejo yang sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian pada kinerja keuangannya. Dengan menggunakan rasio efektivitas, harapannya bisa mengetahui pencapaian target antara anggaran dan realisasi PADes. Analisis dengan rasio efisiensi diharapkan bisa mengukur sejauh mana pengoptimalisasian antara output dengan input, dan analisis dengan rasio pertumbuhan diharapkan bisa mengetahui kondisi PADes selama lima tahun anggaran. Dari penjelasan rasio diatas dan adanya ketidaksesuaian yang terjadi pada laporan keuangan, apakah kinerja keuangan Desa Kepuhrejo berada pada kriteria efektif, efisien, dan mengalami pertumbuhan yang positif? Atau malah sebaliknya?

Penjelasan dari latar belakang diatas cukup menarik peneliti untuk menganalisis kinerja keuangan di Desa Kepuhrejo. Dengan mengetahui kinerja keuangan selama lima tahun terakhir diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif terkait kondisi keuangan desa, mengidentifikasi masalah yang muncul serta menjadi bahan evaluasi perbaikan di masa mendatang, sehingga peneliti melakukan penelitian menggunakan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio Keuangan Pada Kantor Desa Kepuhrejo, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung periode 2019-2023”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah awal yang penting dalam proses penelitian agar peneliti bisa mengenali objek suatu masalah dengan jelas. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah tentang kinerja keuangan desa dalam kurun waktu 2019-2023. Permasalahan ini menghasilkan beberapa masalah utama yang harus ditangani. Pertama, efektivitas kinerja keuangan desa sangat penting karena merupakan alat krusial untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Kedua, dengan menggunakan rasio keuangan daerah, evaluasi kinerja keuangan akan menunjukkan seberapa efisien keuangan di desa tersebut. Apakah kinerjanya akan meningkat atau bahkan mengalami penurunan. Ketiga, dengan perhitungan rasio pertumbuhan, kinerja keuangan di Desa Kepuhrejo akan terlihat apakah tetap dalam range positif meningkat atau bahkan menginjak angka negatif selama kurun waktu lima tahun ini.

Kehadiran dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Desa Kepuhrejo dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam pengelolaan dana desa sehingga pengelolaan di masa depan akan menjadi lebih optimal.

2. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada analisis kinerja keuangan yang menggunakan 3 rasio keuangan, yakni efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan dengan meninjau Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Periode 2019-2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masaah yang telah dipaparkan di atas, maka ditemukan rumusan masalah pokok yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Kantor Desa Kepuhrejo, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung berdasarkan rasio efektifitas tahun 2019-2023?
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Kantor Desa Kepuhrejo, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung berdasarkan rasio efisiensi tahun 2019-2023?
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Kantor Desa Kepuhrejo, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung berdasarkan rasio pertumbuhan tahun 2019-2023?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pada Kantor Desa Kepuhrejo, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung berdasarkan rasio efektifitas pendapatan tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pada Kantor Desa Kepuhrejo, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung berdasarkan rasio efisiensi belanja tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pada Kantor Desa Kepuhrejo, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan tahun 2019-2023.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil yang akan dicapai diharapkan dapat berguna atau bermanfaat bagi pembaca, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan rujukan penelitian dan menambah wawasan mengenai analisis kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio keuangan Pada Kantor Desa Kepuhrejo, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung periode 2019-2023.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta referensi kepada mahasiswa akuntansi syariah untuk bahan penelitian lebih lanjut mengenai ilmu ekonomi dan bisnis, khususnya analisa terkait kinerja keuangan daerah.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan koleksi bacaan perbendaharaan perpustakaan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung serta menambah referensi literasi pembelajaran kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini yang dilakukan maka diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mahasiswa di bidang akuntansi syariah.

d. Bagi Pemerintah Desa Kepuhrejo

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi, gambaran, dan memberikan masukan dan informasi untuk mengambil kebijakan dalam perbaikan ataupun peningkatan kinerja keuangan pemerintah desa.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah, yang dapat diukur dengan uang ataupun segala bentuk kekayaan yang dapat menjadi milik daerah terkait dengan hak dan kewajiban tersebut.¹³

b. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan kondisi keuangan sebuah instansi yang dapat dinilai melalui metode tertentu, seperti realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dengan pendekatan akrual, sehingga dapat disimpulkan sejauh mana instansi tersebut berhasil dalam mengelola keuangannya.¹⁴

c. Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka yang ada dalam komponen laporan keuangan guna menilai dan menaggambarkan kondisi keangan aktual suatu perusahaan.¹⁵

¹³ PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹⁴ Heri Faisal Harahap, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tapanuli Tengah, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 4 No. 1, (2020), hal. 34

¹⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2021), hal. 104

d. Pemerintah Desa

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa, pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

2. Secara Operasional

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio Keuangan Pada Kantor Desa Kepuhrejo, Kec, Ngantru, Kab. Tulungagung periode 2019-2023 adalah kegiatan studi yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang bagaimana dana desa dikelola oleh Desa Kepuhrejo dalam mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan dasar urutan bab yang akan dijabarkan dalam penelitian skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 6 Bab, dengan uraiannya sebagai berikut:

¹⁶ Khairid Ali, “Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar”, *Jurnal Dharmawangsa*, Vol. 14 No. 4 (2020), hal. 608

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

- a. Latar Belakang Masalah, memuat masalah atau hal-hal yang menjadi dasar dan alasan dilakukannya suatu penelitian.
- b. Identifikasi Masalah, dan Batasan Masalah memuat pendeskripsi masalah yang ada pada topik tertentu.
- c. Rumusan Masalah, memuat masalah yang perlu untuk dipecahkan, dibahas dan dicari hasilnya.
- d. Tujuan Penelitian, memuat tujuan dari memecahkan rumusan masalah.
- e. Kegunaan penelitian, memuat manfaat yang diperoleh baik dari pihak peneliti, akademisi, dan objek penelitian.
- f. Penegasan Istilah, memuat memuat kajian teori disertai istilah-istilah singkat dan bersifat umum.
- g. Sistematika Penulisan Skripsi, memuat tata kelola dalam penulisan sebuah skripsi secara sistematis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas rumusan masalah dan teori pembahasan yang mendukung penelitian. Pada bab ini juga mencakup kajian penelitian sebelumnya yang terkait sebagai bahan masukan, pengembangan dan pedoman.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

- a. Pendekatan dan Jenis Penelitian, yaitu metode dan jenis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian
- b. Lokasi Penelitian, memuat tempat dimana penelitian itu terjadi dan dilakukan.
- c. Kehadiran Peneliti, memuat penjelasan bagaimana seorang peneliti terjun ke lapangan dalam penggalian informasi dan data yang dibutuhkan.
- d. Jenis dan Sumber Data, memuat jenis data yang diperlukan dan subjek atau sumber dari datanya.
- e. Teknik Pengumpulan Data, memuat metode atau cara yang dipakai dalam mengumpulkan data penelitian.
- f. Teknik Analisis, memuat cara yang digunakan untuk menganalisis dari temuan data yang telah didapatkan.
- g. Pengecekan Keabsahan Temuan, memuat tahapan yang diperlukan guna uji keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi penjabaran temuan penelitian yang sudah dilakukan dengan menghubungkannya dengan kajian teori yang menjadi dasar dan pedoman dalam penelitian dan disusun secara sistematis.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil temuan atau jawaban dari masing-masing rumusan masalah dari penelitian yang telah diteliti dan disusun secara sistematis serta dikaitkan dengan kajian teori dan penelitian terdahulu.

BAB VI PENUTUP

Pada Bab ini berisi kesimpulan yang memuat ringkasan dari hasil pembahasan skripsi peneliti dan saran dari penelitian yang memuat pendapat, masukan dan kritikan yang disampaikan peneiti untuk perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber yang digunakan sebagai pedoman dan bahan rujukan dalam melakukan penelitian serta pengembangan kajian bahasa. Sumber dapat berupa buku tercetak, e-book, jurnal tercetak, e-journal dsb.

LAMPIRAN

Berisi berkas-berkas pendukung penelitian seperti hasil wawancara, dokumentasi, surat izin penelitian, kartu kendali skripsi, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup peneliti.